



---

## Tren Childfree dan Unmarried di kalangan Masyarakat Jepang

*Childfree and Unmarried Trends among Japanese Society*

<sup>1)</sup>Dhimas Adi Nugroho, <sup>2)</sup>Fitri Alfarisy, <sup>3)</sup>Afzal Nuradhim Kurniawan, <sup>4)</sup>Elin Rahma Sarita

<sup>1,2,3,4)</sup>Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

\*Email: dhimas3006@gmail.com

\*Correspondence: dhimas3006@gmail.com

---

DOI:

10.36418/comserva.v1i11.153

Histori Artikel:

Diajukan:  
22/12/2021

Diterima:  
23/12/2021

Diterbitkan:  
31/03/2022

### ABSTRAK

Masuknya pengaruh budaya barat ke Jepang membawa berbagai macam tren-tren, baik berupa teknologi, sains dan tren, salah satu diantaranya adalah tren childfree dan unmarried, tren ini mulai diikuti oleh masyarakat Jepang khususnya di daerah perkotaan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui asal penyebab tren childfree dan unmarried. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, mengurai tentang tren yang sedang berkembang di masyarakat Jepang sekarang, dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Perkembangan dari tren ini membawa dampak besar bagi Jepang, khususnya kaum wanita dan terhadap angka pertumbuhan penduduknya, budaya patriarki yang ada sejak lama memacu wanita Jepang untuk menyuarkan hak-haknya dalam menentukan diri sendiri. Gerakan feminisme berkembang dan memberi pengaruh besar bagi wanita Jepang. dari tren ini dapat disimpulkan bahwa masalah kependudukan mulai muncul diantaranya meningkatnya jumlah penduduk tua dan rendahnya angka pertumbuhan penduduk, selain itu upaya pemerintahan Jepang muncul agar hak-hak wanita Jepang terpenuhi dan pertumbuhan penduduk naik.

**Kata kunci:** Childfree; Feminisme; Pertumbuhan Penduduk; Tren; Unmarried.

### ABSTRACT

The entry of western cultural influences into Japan brought various kinds of trends, both in the form of technology, science and trends, one of which is the trend of child-free and unmarried, this trend began to be followed by Japanese people, especially in urban areas. child-free and unmarried trends. This research uses descriptive analysis method, describes the current trends in Japanese society, and data obtained from literature studies. The development of this trend has had a major impact on Japan, especially women and on the rate of population growth, the patriarchal culture that has existed for a long time has spurred Japanese women to voice their rights in self-determination. The feminist movement developed and had a great influence on Japanese women. From this trend, it can be concluded that population problems are starting to emerge, including the increasing number of elderly people and the low rate of population growth. In addition, the Japanese government's efforts have emerged so that the rights of Japanese women are fulfilled and population growth increases.

**Keywords:** Childfree; Feminism; Population growth; Trends; Unmarried.

---

## **PENDAHULUAN**

Berkembangnya paham feminisme dimulai pada akhir abad-19 di Jepang, dimana paham ini telah memberikan ruang yang lebih luas pada aktivitas wanita. Wanita mulai menunjukkan eksistensinya dalam bidang Pendidikan, pekerjaan, HAM, dan berbagai bidang kehidupan lainnya ([Adriani, 2014](#)). Para wanita mulai menyadari dan menuntut perlakuan yang lebih adil dalam segala bidang kehidupan, termasuk di dalamnya adalah kesempatan meraih karier yang cemerlang. Akan tetapi perkembangan paham feminisme di Jepang berkembang disertai dengan tindak diskriminasi. Akibat dari tindakan diskriminasi tersebut, akhirnya mendorong meningkatnya wanita Jepang untuk menyuarkan hak-haknya sebagai manusia yang merdeka, salah satunya menunda pernikahan bahkan menolak pernikahan. Serta banyak juga wanita Jepang sudah menikah membatasi jumlah anak bahkan ada yang menolak untuk memiliki anak dan mereka lebih berfokus pada karir yang cemerlang ([Nemoto, 2008](#)). Hal ini memunculkan permasalahan kependudukan di Jepang. Karena semakin tingginya fenomena childfree dan unmarried berpengaruh besar terhadap penurunan populasi jumlah penduduk Jepang. Yang menjadi kekhawatiran adalah jika fenomena ini terus berlangsung, dalam kurun waktu tertentu populasi masyarakat Jepang akan mengalami penurunan drastis yang akan berpengaruh pada kestabilan SDM dan produktivitas perekonomian nasional ([Kato, 2018](#)).

Menurut Cambridge Dictionary, Unmarried didefinisikan sebagai tindakan tidak menikah atau not married, yaitu seseorang yang memutuskan untuk tidak melakukan pernikahan walaupun menjalin hubungan yang didasari atas suka sama suka. Mereka yang memutuskan untuk unmarried mayoritas dating dari golongan wanita, hal ini karena mereka memiliki banyak pertimbangan, salah satunya diskriminasi gender bagi perempuan. Diskriminasi gender menjadi penyebab utama perempuan untuk menyuarkan hak-hak asasi mereka, beragam permasalahan muncul terhadap has asasi perempuan.

Ragam diskriminasi gender meliputi ([UGM, 2018](#)):

1. Stereotip Gender

Wanita digolongkan atau kelompok yang posisinya lebih rendah terhadap laki-laki,

2. Marginalisasi

Proses peminggiran dari akses sumber daya atau pemiskinan yang dialami perempuan akibat perubahan gender, contoh: Perempuan hanya boleh mengurus rumah tangga, tidak boleh keluar rumah, terbatas mengurus keluarga.

3. Kekerasan dan perlakuan kasar dari superior atau patriarki dari kekuasaan laki-laki.

4. Beban Ganda

Beban pekerjaan yang diterima perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Contoh: perempuan mengurus suami, anak, melahirkan, menyusui, bekerja, tetapi sering tidak dianggap melakukan sesuatu dan tidak dihargai.

5. Subordinasi

Kondisi dimana posisi perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki. Contoh: perempuan tidak mendapat kesempatan memberikan usul atau kesempatan mengambil keputusan.

Hal-hal tersebut menjadi alasan perempuan menyuarkan hak asasi mereka salah satunya dengan Gerakan Unmarried. Dengan unmarried wanita dapat memiliki hak kebebasan dalam menentukan diri sendiri.

*Childfree* adalah bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan keadaan tidak melahirkan anak yang sebelumnya hanya ada dalam hal ketidakhadiran atau kekurangan menjadi ibu, seperti dalam

"infertilitas" atau "tidak memiliki anak." Baru-baru ini, istilah bebas anak telah direklamasi oleh mereka yang menekankan bahwa tidak memiliki anak dapat menjadi aktif dan memuaskan pilihan ([Bartlett, 1995](#)). *Childfree* sendiri menjadi pilihan wanita atau pasangan dikarenakan adanya suatu hal yang mendasari, contohnya latar belakang permasalahan keluarga yang patriarki, pertimbangan pengasuhan anak di masa depan, tingginya biaya hidup, hingga isu lingkungan. Dengan *childfree* wanita dapat memiliki kebebasan dalam memenuhi tujuan hidup masing-masing, misal ingin memiliki karir dan impian yang tinggi, tingginya biaya hidup di kota menjadikan pasangan berpikir dua kali untuk memutuskan memiliki anak. Adapun juga wanita atau pasangan tidak memiliki kemampuan dalam mengasuh anak, dikarenakan takut jika tidak dapat mendidik anak dan memberikan kehidupan yang lebih baik. Memilih keputusan *childfree* tidak menutup kemungkinan untuk mengubah keputusan tersebut di masa depan, dengan pertimbangan panjang, biasanya para pasangan memilih cara mengadopsi anak terlantar dan yatim piatu dibanding dengan memiliki anak secara biologis.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, sumber data yang diperoleh dari sumber Jurnal dan Internet. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini mengurai fenomena *childfree* dan *unmarried* di kalangan masyarakat Jepang dan pengaruhnya terhadap penurunan angka pertumbuhan penduduk yang memiliki dampak terhadap masa depan sumber daya manusia Jepang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagai negara maju dan salah satu anggota Group of 7, Jepang menjadi negara dengan kemajuan ekonomi yang sangat cepat, hal itu didukung juga dengan tingginya angka Sumber Daya Manusia di Jepang. Namun dari tahun ke tahun angka pertumbuhan penduduk Jepang terus menerus turun, hal ini mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia di Jepang. Banyaknya pemuda-pemudi Jepang yang menganut budaya gila kerja (*働き方改革*) Menurut UU, jam kerja resmi di Jepang adalah 8 jam sehari, 40 jam seminggu, hingga 44 jam di industri tertentu (UU Standar Tenaga Kerja; Pasal 32,40,131), dan batas lembur 15 jam perminggu. Hal ini memungkinkan pekerja memiliki waktu luang untuk diri mereka sendiri. Alih-alih menghabiskan waktu untuk liburan, mereka menghabiskan waktu tersebut dengan lembur dan menjadikan mereka tidak memiliki waktu untuk menjalin hubungan.

Sejak berkembangnya budaya modern barat yang masuk di Jepang hal, ini memberikan pengaruh besar terutama dalam tatanan kehidupan. Menurut World Economic Forum, Jepang menduduki Peringkat 144 dari 144 negara dalam kesetaraan gender, hal ini didukung dengan adanya budaya patriarki yang kental di kehidupan masyarakat Jepang, maraknya anggapan bahwa perempuan harus didomestikasi. Perempuan dibebani kewajiban mengurus anak dan rumah, sementara pekerjaan di luar diurus sepenuhnya oleh suami, istri yang tidak menurut pada aturan suami dan keluarga dianggap sebagai orang yang gagal dan dirundung oleh masyarakat sekitar, hal ini menyebabkan para Wanita ingin memiliki kebebasan dalam hak hidup ([Roosiani, 2016](#)).

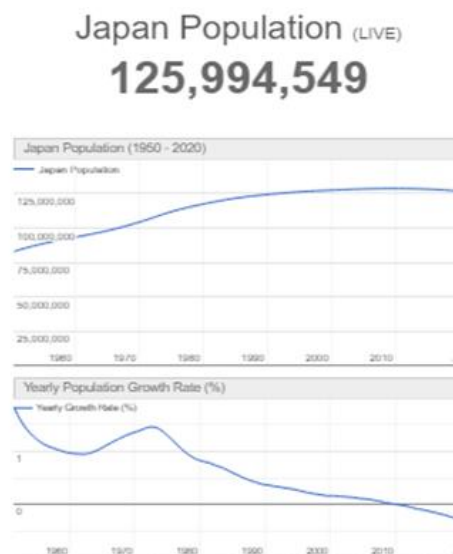
Menurut ([Fujikawa, 2018](#)), diskriminasi mengakibatkan fenomena kelangkaan perempuan Jepang yang menduduki posisi elite di berbagai korporasi, Negara tersebut memiliki rasio manajer perempuan terendah di antara negara maju lainnya.

Munculnya Gerakan feminisme di Jepang mulai abad-19 ini membuka jalan bagi para kaum Wanita untuk merdeka dalam hak atas diri sendiri. Munculnya feminisme saat Masa Meiji (1868-1912) membawa pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Jepang meliputi, gaya busana, Pendidikan, dan *gender equality* ([Kobayashi, 2004](#)). Salah satu konsep yang diusung oleh Fukuzawa Yukichi, Mori

---

arinori dan Iwamoto Yoshiharu tentang persamaan hak dan kewajiban antara pria dan Wanita dimulai dengan kesetaraan di bidang Pendidikan, dan sampai sekarang. Gerakan feminisme ini terus berjalan dan memberikan pengaruh salah satunya adalah hak wanita dalam menentukan arah hidup, salah satunya *Unmarried* dan *Childfree*.

Keputusan untuk tidak memiliki anak ini lahir atas berbagai pertimbangan yang tentunya tidak mudah, tingginya angka penduduk Jepang yang bekerja di daerah perkotaan menjadikan biaya hidup yang tidak murah, Rata-rata orang Jepang membutuhkan biaya ¥547,493 atau sekitar Rp 72,4 juta untuk yang sudah berkeluarga dan ¥309,245 atau Rp 41 juta untuk yang belum menikah.



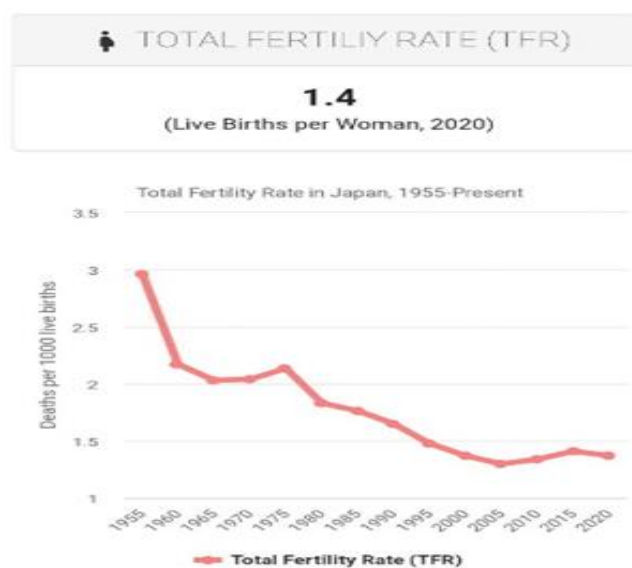
**Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Penduduk Jepang**

Tingginya biaya hidup di Jepang, terutama di daerah perkotaan dan area bisnis menyebabkan masyarakat Jepang menunda keputusan untuk memiliki anak dikarenakan memiliki anak membutuhkan waktu dan biaya yang lebih. Generasi muda Jepang menginginkan untuk bekerja di kawasan perkotaan, keinginan untuk mengejar karir yang tinggi tentunya membuat mereka mau tak mau harus merelakan waktu mereka untuk memiliki pasangan, bahkan hanya sekadar menjalin hubungan kecil mereka tidak mampu. berikut adalah rata-rata daftar biaya hidup di daerah perkotaan Jepang.

- Ukuran 85 meter persegi di lokasi strategis: ¥290 atau Rp 38 juta.
- Ukuran 85 meter persegi di lokasi normal: ¥166 ribu atau Rp 22 juta.
- Biaya pemanas, listrik dan gas untuk rumah ukuran 85 meter persegi: ¥23 ribu atau Rp 3 juta.
- Ukuran 45 meter persegi di lokasi strategis: ¥145 ribu yen atau Rp 19 juta.
- Ukuran 45 meter persegi di lokasi normal: ¥80 ribu atau Rp 10,5 juta.
- Biaya pemanas, listrik, gas untuk rumah ukuran 45 meter persegi: ¥12 ribu atau Rp 1,6 juta.
- Internet 8 Mbps: ¥4.300 atau Rp 568 ribu.
- Biaya jasa bersih-bersih per jam: ¥2.500 atau Rp 330 ribu.

### Gambar 2. Daftar biaya hidup di daerah perkotaan Jepang

Biaya tersebut belum termasuk dengan biaya kebutuhan sehari-hari beserta dana tabungan dan dana darurat, sehingga masyarakat Jepang memilih untuk menunda ataupun tidak memiliki keinginan untuk memiliki anak dan lebih memilih untuk memiliki hewan peliharaan yang tentunya lebih simple (Pintek.id, 2021). Hal ini didukung dengan data yang dirilis dari worldometer.info, tingkat kesuburan wanita Jepang menurun menjadi 1,4, jika angka tingkat kesuburan dibawah 2,1 maka dipastikan penurunan angka penduduk terjadi dan di masa depan penduduk asli negara tersebut akan hilang.



Gambar 3. Grafik tingkat kesuburan di Jepang

Tidak hanya alasan tingginya biaya hidup di perkotaan, bagi mereka memiliki anak menghambat seseorang dalam mengejar karir yang mereka inginkan di hidup mereka, mobilitas yang tinggi dan waktu yang kurang menyebabkan mereka memilih untuk tidak memiliki anak. Hal ini juga terjadi pada masyarakat Korea Selatan, anggapan memiliki anak hanya akan membuang waktu dan menghambat masa depan mereka kemudian menjadikan tren childfree ini dianut oleh masyarakat-nya.

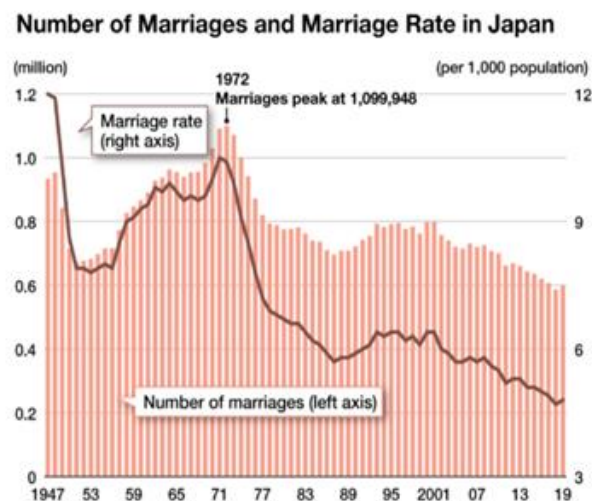
Alih-alih tidak memiliki anak, masyarakat Jepang lebih senang untuk tidak menikah, faktor penyebab yang sama pun menjadi alasan kenapa masyarakat Jepang memilih tren unmarried ini. Unmarried adalah orang yang tidak menikah, belum menikah atau memutuskan hidup bersama satu atap tanpa adanya ikatan pernikahan. Hal ini didukung dengan salah satu budaya Jepang yaitu Hikikomori budaya mengurung diri menutup interaksi secara tatap muka, merasa dunia tidak memerlukan dirinya dan dapat hidup sendiri. mereka di kamar setiap hari sepanjang tahun mengurung diri, hal ini menjadikan kurangnya interaksi sosial terlebih kepada lawan jenis.

Ajaran Konfusianisme memberikan pengaruh besar terhadap tatanan gender di Jepang, ajaran yang datang dari Cina dan menyebar di Jepang ini membawa paham patriarki yang berlebihan. wanita diajarkan patuh terhadap ayah dan suami dimana suami atau ayah dianggap sebagai sosok yang dihormati bahkan ditakuti. Terjadinya senioritas yang memperbolehkan laki-laki mengeksploitasi

perempuan menjadikan para wanita enggan menikah, akan tetapi budaya ini seiring waktu berubah dengan kemajuan zaman modern meskipun budaya patriarki masih amat kental di masyarakat Jepang sekarang.

Salah satu contoh budaya patriarki yang terjadi di masyarakat Jepang sekarang jika wanita menikah tentunya wanita akan pindah ikut dengan suaminya, hidup dengan keluarga suami, tekanan psikis yang dialami oleh istri dari keluarga suami, mengurus mertua apabila sakit mengakibatkan wanita enggan untuk memutuskan menikah. Wanita dibatasi hak-haknya dalam mengeluarkan pendapat, mendapat perlakuan semena-mena dan dianggap kaum lemah. Tentunya para wanita Jepang ingin hak-hak nya sebagai manusia yang merdeka ada dan terpenuhi, salah satunya dengan gerakan feminisme yang menyuarakan kesetaraan gender.

Alasan lain untuk unmarried pun muncul, hidup sendiri tentunya menghabiskan biaya yang cukup murah daripada hidup berdua dengan pasangan. Tidak hanya itu, Adapun banyak masyarakat Jepang yang memilih menjalin hubungan tetapi tidak memutuskan untuk menikah walaupun tinggal satu “Apaato”, hal ini tidak terlepas dari budaya barat yang semestinya bertentangan dengan budaya timur.



**Gambar 4. Angka pernikahan di Jepang**

Dapat dilihat bahwa kian tahun angka pernikahan di Jepang semakin menurun, apabila angka tersebut terus menurun dari tahun ke tahun maka dipastikan Jepang akan mengalami kekurangan penduduk muda dan meningkatnya penduduk lanjut usia, warga usia produktif jarang terlihat dan menyebabkan tingkat sumber daya manusia Jepang menurun dan kemungkinan gelombang imigran akan masuk ke negara tersebut.

Beragam cara dilakukan pemerintahan Jepang dalam mengatasi penurunan angka pertumbuhan penduduk, Jepang mengadakan kegiatan perjodohan yaitu “omiaiai”, budaya ini memberikan manfaat besar terhadap masyarakat Jepang bagi mereka yang tidak memiliki waktu untuk mencari pasangan, mereka tinggal datang atau menghubungi biro perjodohan, mendaftarkan diri dan mengikuti alur yang telah ditentukan sampai bertemunya kedua klien pasangan, pernikahan yang berasal dari budaya omiaiai ini memiliki persentase perceraian yang sedikit dibanding dengan pernikahan yang berasal dari cinta kedua pasangan.



Larangan aborsi berdasarkan statute hukum *Eugenic Protection Law* 1948 dan versi revisinya, *Maternal Body Protection Law* 1996, Aborsi legal hanya boleh dilakukan dalam 24 minggu (6 bulan) pertama usia kehamilan, wajib dalam fasilitas medis memadai di bawah pengawasan dokter yang telah ditunjuk oleh asosiasi medis lokal, dan atas persetujuan dari pasien. Persetujuan dari wanita pengidap keterbelakangan mental dapat diberikan oleh walinya. Ketika kehamilan adalah hasil perkosaan atau inses, aborsi bisa dilakukan tanpa persetujuan hukum dari wanita tersebut. mendukung kelahiran di luar ikatan nikah, mengadopsi sistem baby hatches, membuat buku pegangan kehamilan, ([Jatiningrum, 2014](#)), “mencanangkan program Ikumen Project, yaitu menjadi ayah atau suami yang friendly terhadap keluarga. Dalam mengupayakan agar masalah shoushika dapat terselesaikan. Selain itu, perusahaan-perusahaan juga mendukung program pemerintah dengan mempermudah karyawan untuk cuti ataupun datang terlambat dan pulang lebih awal serta memberikan fasilitas nursery bagi yang membutuhkan.”

## **SIMPULAN**

Berdasarkan tren unmarried dan childfree yang terjadi di masyarakat Jepang sekarang membuktikan bahwa gerakan feminisme memberikan pengaruh besar terhadap tatanan kehidupan wanita Jepang. mulai mendapat hak-hak merdeka atas diri sendiri dan menentukan arah hidup masing-masing, cita-cita wanita Jepang yang ingin karir mereka maju dan mandiri tanpa merasa terbebani dan membebani. Pudarnya budaya patriarki yang ada di Jepang memberi sedikit harapan bagi mereka yang menginginkan childfree dan unmarried sebagai solusi atas tingginya biaya hidup di Jepang dan pasangan yang belum mampu membimbing dan mencukupi kebutuhan hidup, akan tetapi beragam permasalahan muncul dalam demografi kependudukan Jepang, kian tahun angka natalitas menurun, oleh karena itu pemerintah Jepang mengupayakan berbagai cara guna angka pertumbuhan penduduk naik dan tidak adanya diskriminasi gender bagi wanita Jepang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, S. D. (2014). Pengaruh Paham Feminisme Terhadap Penurunan Populasi Penduduk di Jepang [少子化]. *Humaniora*, 5(1), 349–356. <https://doi.org/https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.3033>.
- Bartlett, J. (1995). *Will you be mother?: Women who choose to say no*. London: Virago Press.
- Fujikawa, P. D. & M. (2018). Medical School's Exam-Rigging Against Women Prompts Furor in Japan. *The Wall Street Journal*.
- Jatiningrum, M. A. (2014). *Upaya-upaya Jepang dalam Mengatasi Masalah Penurunan Tingkat Kelahiran (Fenomena Shoushika)*. Universitas Gadjah Mada.
- Kato, A. (2018). *Declining marriage and ever-increasing childlessness—Japan's future will be lost if nothing is done*. Research Department, School of Political Sciences and Economics, Meiji University, Japan.
- Kobayashi, Y. (2004). *A path toward gender equality: State feminism in Japan*. Britania Raya: Routledge.
- Nemoto, K. (2008). Postponed marriage: Exploring women's views of matrimony and work in Japan. *Gender & Society*, 22(2), 219–237. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0891243208315868>.
- Pintek.id. (2021). *Kisaran Gaji dan Rincian Biaya Hidup di Jepang, Hingga Rp 24 Juta Per Bulan!* Pintek.Id.
- Roosiani, I. (2016). Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Jepang. *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana*, 1(13), 70–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/wahana.v1i13.672>.
- UGM, M. (2018). *Ketidakadilan Gender & Kekerasan Terhadap Perempuan Vol.II*.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).